



**KEPAHIANG**

**RABU, 24 NOVEMBER 2021**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**WTP Bisa Jadi Daya Tarik Investor**

**KEPAHIANG** - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Kepahiang dari BPK atas laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut (2018, 2019, dan 2020) serta sebelumnya 2016, menjadi penilaian positif. Tentu ini menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepahiang.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan, SE, MM saat penyerahan plakat dan piagam WTP dari Menteri Keuangan (Menkeu). Berlangsung di aula Setdakab Kepahiang, kemarin (23/11).

Dia mengatakan, dalam memberikan opini WTP ada 4 unsur yang dinilai oleh BPK. Pertama, sudah melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, sebagian besar organisasi perangkat daerah patuh dengan peraturan. Ketiga, OPD bekerja dengan maksimal dalam melakukan penataan sesuai dengan standar serta bekerja

secara akuntabel dan lebih profesional kedepannya.

"WTP ini ada banyak sekali dampaknya. Seperti menjadi daerah potensial yang dilirik oleh investor karena kepercayaan bagi penanam investor ialah kepatuhan terhadap penataan dan pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. WTP juga merupakan salah satu syarat daerah mendapatkan dana insentif daerah (DID). Mudah-mudahan dapat teralokasi pada tahun mendatang," jelas Syarwan.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayattullah Sjahid, MMIPU menjelaskan bahwa raihan opini WTP juga karena proses penganggaran dan pengesahan yang tepat waktu. Kemudian, pemerintah daerah dalam penyampaian laporan penggunaan anggaran tepat waktu. Penghargaan tersebut kata Bupati merupakan tertinggi yang didapat oleh pemerintah daerah berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

"WTP memungkinkan daerah mendapatkan DID untuk alokasi anggaran bagi daerah. Yang jelas ini menjadi dorongan bagi kita untuk patuh terhadap pengelolaan keuangan. Meski memenuhi unsur penilaian dan meraih WTP, namun demikian tetap ada catatan dan rekomendasi. Masih ada juga kekurangan nilai yang harus kita sempurnakan," demikian Bupati. (sly)